

KEBANGKITAN ISLAM DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA (Studi Analisis Dampak Gerakan 212)

Burhanudin Rabani, Nila Sastrawati
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nhozvanmaloko@gmail.com, nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Fenomena Gerakan 212 adalah peristiwa langkah yang dialami oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Gerakan tersebut merupakan implikasi dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang memicu gelombang protes berjilid-jilid dari kalangan umat Islam, bahkan sempat menimbulkan kegaduhan politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi gerakan 212 dan dampaknya terhadap kebangkitan Islam dalam sistem politik di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan sosial politik. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pada awalnya, gerakan 212 adalah gerakan moril sebagai respon atas penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, meskipun pada akhirnya sebagian kalangan menganggap bahwa gerakan 212 juga memiliki tendensi politik dan menjadi simbol kebangkitan politik identitas; 2) Dampak dari gerakan 212 terhadap kebangkitan Islam adalah terbentuknya organisasi GNPF-Ulama, PA 212, hingga gerakan ekonomi kreatif umat Islam melalui Koperasi Syariah dan 212 Mart; 3) Secara politik, dampak gerakan 212 adalah terpilihnya Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021.

Kata Kunci: Gerakan 212; Kebangkitan Islam; Politik Identitas; Sistem Politik

Abstract

The phenomenon of Movement 212 is a step event experienced by Muslims and Indonesians. The movement is an implication of the case of blasphemy committed by the former Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, which triggered a wave of mass protests from Muslims, even caused national political tumult. The research aims to determine the existence of the 212 movement and its impact on the rise of Islam in the political system in Indonesia. This research is classified as library research. The data sources used are primary and secondary data using a socio-political approach. The results of this study are: 1) At first, the 212 movement was a moral movement in response to Basuki Tjahaja Purnama blasphemy of Islam, although in the end some considered that the 212 movement also had a political tendency and became a symbol of

the rise of identity politics; 2) The impact of the 212 movement on the rise of Islam is the establishment of GNPf-Ulama organization, PA 212, to the creative economy movement of Muslims through Sharia Cooperative and 212 Mart; 3) Politically, the impact of movement 212 is the election of Anis Baswedan and Sandiaga Uno as Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta for the period 2017-2021.

Keywords: Movement 212; The Rise of Islam; Identity Politics; Political System

PENDAHULUAN

Sejak rezim Orde Baru, Indonesia oleh Soeharto dijadikan sebuah Negara yang kuat dengan prinsip sentralisasi kekuasaan, agar tujuan ini tercapai dengan menggunakan mekanisme “*stick and carrot*”.¹ Rezim Orde Baru akan memberikan “*rewards*” yang sebaik-baiknya dalam bentuk penyediaan kebutuhan dasar, kedudukan dan jabatan kepada individu, lembaga maupun kelompok yang secara jelas menunjukkan loyalitasnya. Sebaliknya “*stick*” dipakai untuk menyerang pusat-pusat kekuasaan lain dan menyingkirkan lawan-lawan politik yang menjadi saingannya dalam mengakumulasi kekuasaan.²

Perjalanan politik tersebut ternyata berhasil dilakukan oleh Soeharto selama 32 tahun berkuasa di Negara Pancasila. Negara ini dibangun seperti piramida, dipuncak piramida tersebut terdapat Soeharto dan di kaki piramida terdapat partai politik, militer dan birokrasi Negara, dan semuanya pusat dibawah kontrol penuh presiden.

Pasca Reformasi, peran *civil* Islam dengan merujuk pada dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU memberikan gambaran yang optimis tentang para muslim dalam demokrasi Indonesia. Kedua organisasi ini aktif mendorong demokratisasi melalui sistem Pemilu yang demokratis, penegakan hukum, fatwa anti korupsi, dan mendorong *good governance*, serta aktif dalam membangun kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih baik (*civil*).³

Meskipun kedua organisasi Islam tersebut bukan partai politik, tetapi keberadaannya

¹ Afan Gafar, *Reformasi Politik: Menuju Kehidupan Politik Lebih Demokratis*, (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, 1998), hlm. 49.

² Jeffrey A. Winters, *Ketidak pastian di Indonesia Pasca Era Soeharto*, dalam Jeffrey A. Winters, *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 39.

³ Hafner, Robert W., *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001), hlm. 30.

Telah berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan selalu memberikan warna-warni dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Sekalipun sering digerogeti oleh kelakuan politisi salah tingkah dalam berbagai periode sejarah pasca Reformasi, Indonesia masih bertahan dengan segala keberuntungan dan malapetaka didalamnya. Tantangan bangsa Indonesia dalam kacamata perpolitikan ini adalah bagaimana hadirnya gerakan-gerakan sosial yang kemudian mengatasnamakan golongan dan identitas tertentu.

Indonesia adalah negara tentram dan damai. Ketentraman dan kedamaian itu kembali terusik ketika ada muatan keagamaan dalam narasi-narasi gerakan sosial politik belakangan ini. Fenomena langka yang terjadi, yaitu sebagian umat Islam Indonesia menjelang akhir tahun 2016 adalah kemunculan “Aksi Bela Islam” yang berhasil memobilisasi umat Islam dalam jumlah cukup banyak, yang sempat mengejutkan banyak pihak. Keterkejutan banyak pihak atas aksi-aksi tersebut dengan latar belakang anggapan bahwa Islam Indonesia, seperti yang kerap di klaimkan adalah model Islam yang toleran, damai dan lebih jauh, mendukung cita-cita demokrasi. Mengapa gerakan ini seperti bak bola salju yang semakin membesar dan mendapat simpati secara luas dari masyarakat atau apakah serangkaian “Aksi Bela Islam” tersebut atau sebuah isyarat atas gambaran tentang umat muslim Indonesia yang telah berubah.⁴

Aksi Bela Islam atau kerap disapa dengan gerakan 212 adalah serangkaian aksi bela Islam yang dilakukan pada tanggal 2 desember 2016. Aksi ini merupakan tuntutan masyarakat muslim Indonesia atas penghinaan atau penistaan ayat al-Qur’an yaitu surat al-Ma’idah/51 yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau sering dikenal dengan nama Ahok. Saat itu Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan kampanye di Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2016.

Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama tersebut diunggah oleh Buni Yani ke akun media sosial. Dalam sekejap, video tersebut menjadi perhatian publik dan menimbulkan polemik baru di Indonesia. Begitu banyak masyarakat yang merasa dikecewakan dan bahkan marah terhadap pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dalam video tersebut. Massifnya peredaran video tersebut memantik kemarahan umat Islam yang berujung pada konsolidasi massa aksi.

⁴ Ahmad Sholikin, Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II, III, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 10, Nomor 1, (2018), hlm. 14.

Kemarahan umat Islam memicu lahirnya aksi 212 ini, yang berpusat di Monumen Nasional (Monas) dan dihadiri sekitar 7 juta lebih massa aksi.⁵ Peserta aksi menilai Basuki Tjahaja Purnama tidak pantas memimpin Jakarta dan mereka menilai Basuki Tjahaja Purnama telah menistakan Agama Islam. Peserta aksi menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama di penjara, bukan hanya sekedar dicekal bepergian keluar negeri. Tuntutan yang mereka ajukan akhirnya membuahkan hasil, hingga akhirnya pada 9 Mei 2017 Basuki Tjahaja Purnama di vonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah menerima vonis tersebut, Basuki Tjahaja Purnama kemudian mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.⁶

Konsolidasi di tingkat Negara harus dilakukan namun pada saat yang sama, terdapat konsolidasi internal di kalangan umat Islam. Fenomena ini dapat dibaca dari gerakan politik Islam dengan berbagai isu aktual. Penegakan syariat, Negara Islam, Khilafah Islamiyah, masyarakat madani, dan gerakan-gerakan pelegal-formalan Islam dalam kehidupan politik. Dari sudut pandang politik, Aksi Bela Islam atau gerakan 212 yang terjadi jelas bukan aksi demonstrasi biasa. Kehadirannya lebih dari gerakan sosial (*social movement*) yang syarat dengan muatan ideologis, yang kemudian memantik diskursus ihwal bangkitnya gerakan Islam politik di Indonesia.⁷

Pada dasarnya, sebagian besar analisis dan perbincangan mengenai kebangkitan Islam pada era modern, mengakui pengaruh dan keberhasilan revolusi Iran pada tahun 1979 yang dimotori oleh Ayatullah Khomeini telah menimbulkan semangat baru dikalangan umat Islam dunia. Keberhasilan revolusi Iran membawa perubahan sangat signifikan terhadap sistem pemerintahan Iran, dari sistem monarki menjadi Republik Islam yang berdasarkan pada konsep *vilayat-e-faqih* (perwalian oleh pemimpin agama tertinggi) dengan konsep imamat.⁸

Dewasa ini, tanda-tanda kebangkitan Islam dapat dilihat dari pelbagai gerakan, baik itu gerakan sosial maupun politik yang pada dasarnya merupakan gerakan yang

⁵ Anisa Rahmawati, *Aksi 212, Gerak Politik atau Moral*, (Makalah yang di ajukan pada Fermasi Reguler Sore di Universitas Katolik Widya Mandala Madium, 2020), hlm. 1.

⁶ Detiknews, “*ahok-divonis-2-tahun-penjara*”, <https://news.detik.com/berita/3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>, diakses tanggal 17 Juni 2020.

⁷ *Ibid.* Ahmad Sholikin, hlm. 16.

⁸ Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana , 2001), hlm. 275.

mengatasnamakan identitas agama tertentu atau entitas-entitas tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Runutan dari penjelasan terkait alas pikir kebangkitan Islam tersebut maka, bisa diartikan bahwa Gerakan 212 adalah serangkaian gerakan kebangkitan Islam pada sistem politik Indonesia.

Berdasarkan dari penjelasan terkait *Gerakan 212* tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Kebangkitan Islam dalam Sistem Politik di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara konkrit termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*),⁹ dan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka.¹⁰ Penelitian ini fokus pada pengkajian tentang kebangkitan Islam pada sistem politik di Indonesia (studi analisis dampak gerakan 212). Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian *library research* ini dapat dibagi atas dua bagian, yakni terdiri atas buku utama atau sumber data primer dan buku penunjang atau sumber data sekunder.

Pendekatan dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada pendekatan *sosial politik*. Artinya pendekatan dengan menggunakan kebangkitan Islam pada sistem politik di Indonesia. Metode yang digunakan pengumpulan data adalah *analisis*. Artinya metode pengumpulan data yang mengkaji buku-buku dan jurnal tentang dampak gerakan 212, menghimpun dan menganalisis terkait kebangkitan Islam pada sistem politik di Indonesia (studi analisis dampak gerakan 212).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Gerakan 212

Tepatnya pada tanggal 2 Desember 2016 ada sebuah momen berharga dan langkah yang terjadi di sejarah panjang peradaban umat manusia. Indonesia kini menyumbangkan karya

⁹ Anton Bakker dan Ahmad Chairis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jogjakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

¹⁰ Dea Larissa, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, (2019), hlm. 219-227.

demokratisasi terbaiknya melalui fenomena sosial kemasyarakatnya pada mata bangsa dunia terkait dengan Gerakan 212 yang dilakukan sekelompok umat Islam Indonesia. Momen tersebut kemudian di catat dalam sejarah Indonesia sebagai Gerakan 212, Gerakan 212 juga mendapat perhatian dunia, ini patut di apresiasi dandi kenang sebagai catatan sejarah ketika jutaan orang keluar dari rumah mereka, baik dengan berjalan kaki, berkendara maupun naik pesawat, menuju lapangan Monas Jakarta. Setelah reformasi 1998, baru kali ini ada kumpulan massa jumlahnya begitu banyak dan berlangsung damai.¹¹

Sebagai gerakan umat Islam Indonesia yang komplit dan masif maka sudah menjadi barang tentu bahwa gerakan 212 adalah bukan hanya gerakan demonstrasi biasa tapi gerakan yang penuh dengan orientasi-orientasi baik orientasi komunikasi politik maupun konstruk dan upaya penumbangan rezim yang semakin hari semakin terasa sekulerisasi. Adapun beberapa orientasi dalam gerakan 212 ini di antaranya sebagai berikut:

a. Komunikasi Politik

Gerakan 212 adalah gerakan politis umat islam. Gerakan ini dimaknai sebagai komunikasi politik umat Islam dalam merespon dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang retak akhir-akhir ini. Indikasi diskriminasi terhadap umat Islam semakin kentara. Kemajemukan yang sudah dipupuk kelihatan gersang oleh sahwat politik dan kepentingan golongan tertentu. Umat Islam ingin mengkomunikasikan kepada pemerintah bahwa umat Islam ingin meminta keadilan baik secara penegak hukum maupun bidang ekonomi, sosial, dan budaya.¹²

b. Upaya Pemberhentian Tindakan Otoriterianisme di Tubuh Rezim

Selain Indonesia komunikasi politik, disisi lain ada upaya umat muslim Indonesia dalam Gerakan 212 adalah untuk menghentikan tindakan pemerintah atau rezim yang semakin hari terlihat semakin otoriterianisme dan tentunya tidak sesuai dengan titah perjuangan demokrasi dan sistem politik yang ada di Indonesia. Tindakan rezim yang setiap hari semakin terasa sekuler dan akan memarjinalkan kehidupan umat beragama dalam berkehidupan bermasyarakat.

¹¹ Machmud Mubarak, *Sejarah 212*, <https://jabar.tribunnews.com/2016/12/03/sejarah-212>, diakses tanggal 19 Juni 2020.

¹² Assyari Abdullah, *Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Belah Islam 212: Antara Politik Identitas Atau Dan Ijtihad Politik Alternatif*, *Jurnal an-Nida*, Volume 41, Nomor 2, (2017), hlm. 206.

Demokrasi pasca Orde Baru seharusnya memberikan gambaran tentang masa depan bangsa Indonesia lebih baik terkhususnya masyarakat muslim Indonesia untuk mengisi kehidupan bernegara yang sudah lama di pupuk dalam bingkai kebinekaan yang beragam. Gerakan 212 adalah momen berharga bagi umat Islam Indonesia untuk mengkonfirmasi tindakan rezim yang semakin hari semakin terasa sekularisasi, otoriterianisme dan jauh dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam butir-butir Pancasila.

2. Dampak Gerakan 212 Terhadap Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam merupakan suatu gerakan sosial umat Islam atau kesadaran kolektif umat Islam untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Arus globalisasi dan transmisi modernisasi menjadi acuan terbesar dan terpenting umat Islam untuk mempertahankan ajaran-ajaran ke Islamannya. Misi negara-negara Barat adalah sekularisasi atas kehidupan sosial dan ekonomi menjadi pemicu penting lahirnya kebangkitan Islam. Gerakan 212 adalah upaya umat Islam Indonesia menuntut dan upaya untuk memberhentikan Ahok dari kursi jabatan pemerintahan, disamping itu juga Gerakan 212 adalah upaya kesadaran kolektif umat Islam Indonesia untuk mempertahankan ajaran atas nilai-nilai keislaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perjuangan umat Islam pada gerakan 212 jelas terlihat bahwa umat Islam ternyata masih mempunyai kekuatan terbesar dan sebagai masyarakat mayoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuatan politik global sampai pada politik nasional (dalam negeri), umat Islam hadir untuk mengkonfirmasi dirinya sebagai salah satu kekuatan dalam menghadapi gejolak politik dan kekuasaan. Umat Islam Indonesia dalam gerakan 212 jelas memberikan lampu merah sebagai tanda bahwa umat Islam masih mempunyai kekuatan baik dari segi pemerintahan maupun konstitusi untuk mengisi proses perjalanan bangsa Indonesia Hubungan atau korelasi kebangkitan Islam dan gerakan 212 sangat jelas kelihatan bahwa, gerakan 212 merupakan suatu upaya kemajuan, kesetaraan dan perimbangan umat Islam terhadap dominasi paham sekularisasi di tubuh pemerintahan.

Politik identitas menjadi diskursus besar dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Hal ini di tandai dengan peristiwa aksi gerakan 212 yang terbukti mampu mengumpulkan ratusan ribu massa dalam satu acara. Aksi gerakan 212 ini menjadi bagian dari *social movment*

yang diklaim memperjuangkan kepentingan dari sebagian umat Islam di Indonesia, khususnya yang merasa sakit hati atas ucapan Basuki Tjahaja Purnama karena menyinggung dan salah menafsirkan surah al-Maidah/5:51.

Pada tahun-tahun berikutnya, aksi ini menjadi agenda rutin yang diselenggarakan di setiap bulan Desember, untuk mengenang kesuksesan agenda gerakan 212 sebelumnya, sebanyak enam jilid berturut-turut pada tahun 2016 sampai 2017. Kini aksi massa kembali digelar dengan tajuk Reuni 212 yang juga di pusatkan di Monumen Nasional (Monas). Penamaan aksi Reuni 212 merujuk pada aksi puncak yang di hadiri ratusan ribu orang bahkan beberapa versi menyebutkan jutaan orang, sebagai kelanjutan perjuangan aspirasi massa gerakan 212 awal bulan Desember 2016 lalu.

Inisiator dan lokomotif gerakan 212 awalnya dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan sokongan beberapa Ormas Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), eks HTI dan organisasi lainnya. Pembentukan GNPF-MUI merupakan implikasi dari fatwa MUI, yang menyatakan bahwa ucapan Basuki Tjahaja Purnama yang mengutip surah al-Maidah/5:51 yang disampaikan di kepulauan seribu sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam.

Sebagian pengamat menilai, gerakan 212 memberikan sumbangsi elektoral pada kemenangan pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta, dan sekaligus menjadi *justifikasi* bangkitnya politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta. Berbekal klaim keberhasilan mengantarkan Anis-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, GNPF-MUI dan organ-organ pendukung gerakan 212 tetap berusaha mempertahankan eksistensinya dan secara perlahan bermetamorfosis menjadi beberapa organisasi seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Presidium Alumni 212 (PA 212).¹³

Menurut Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Fahri Salim bahwa,¹⁴ salah satu tanda kebangkitan umat Islam adalah terbentuknya organisasi-

¹³ Vanny Anggara, *Aksi Bela Islam dan Reuni 212 dalam Tinjauan Politik identitas*, <http://www.pojokwacana.com/aksi-bela-islam-dan-reuni-212-dalam-tinjauan-politik-identitas/>, diakses tanggal 21 Juni 2020.

¹⁴ Berita Terkini UMY, BHP UMY: Kebangkitan Dunia Islam Ditandai Dengan Bermunculnya Kembali Para Pengusaha Muslim, <https://www.umat.ac.id/kebangkitan-dunia-islam-ditandai-dengan-bermunculan-kembali-para-pengusaha-muslim.html>, diakses tanggal 23 Juni 2020.

organisasi Islam juga sebagai tanda dari kebangkitan Islam. Sebab organisasi Islam dapat berperang langsung dalam kehidupan masyarakat, karena organisasi-organisasi itu lebih dekat dengan masyarakat.

Dampak gerakan 212 terhadap kebangkitan Islam adalah terbentuknya dua organisasi baru di kalangan umat Islam untuk mengawal kebijakan rezim. Dua organisasi ini akan memberikan isyarat penting lahirnya kehidupan baru umat Islam di tengah-tengah masyarakat. Artinya, GNPF-Ulama dan PA 212 sebagai anak kandung dari gerakan 212 mampu memberi perubahan baru pada umat Islam dalam kehidupan bernegara. Semangat keislaman dan upaya menormalisasi tindakan diskriminasi pemerintahan terhadap umat Islam menjadi garda terdepan dalam menjalankan roda dua organisasi tersebut.

Pola gerakan yang di bangun tetap sama, yakni dengan memainkan tingkat emosional dari kalangan umat Islam atas nama perjuangan agama, menuntut keadilan dan perubahan. Alat yang digunakan dengan memainkan simbol-simbol agama, bendera kalimat Tauhid, teriakan Takbir, bahkan rangkaian ritual *dzikir*, *istiqhoshah*, *sholawatan* menjadi bumbuh yang luar biasa bagi gerakan massa Islam.

Selain itu, menurut Fahmi, kebangkitan peradaban dan umat Islam bisa di tandai dengan semakin banyaknya pengusaha muslim yang muncul. Pengusaha-pengusaha muslim itulah yang bisa menguatkan ekonomi umat Islam, dan secara mengejutkan Gerakan 212 juga merambat pada sektor ekonomi seperti pendirian koperasi syariah dan 212 Mart.

*“karena ekonomi merupakan tolak ukur kesejahteraan suatu bangsa. Dan ekonomi jugalah yang dapat membangkitkan kesejahteraan umat dari keterpurukan. Apalagi sekarang sistem ekonomi Syariah sudah mulai dikenal di dunia Internasional jadi dari situlah kita dapat optimis Islam ini akan bangkit”.*¹⁵

Dampak dari gerakan 212 terhadap kebangkitan Islam, dapat dilihat dari terbentuknya dua organisasi umat Islam dan terbentuknya ekonomi kreatif umat Islam pasca gerakan 212 yaitu GNPF-Ulama, PA 212 dan terbentuknya Koperasi Syariah dan 212 Mart.

3. Dampak Gerakan 212 Terhadap Sistem Politik di Indonesia

Gerakan 212 bukan aksi unjuk rasa biasa, tetapi melainkan gerakan dominasi yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Gerakan 212 juga sangat memiliki dampak. Dampak gerakan 212 juga sangat mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Politik

¹⁵ Ibid.

identitas rasisme juga menjadi pemicu penting dalam memobilisasi massa dalam gerakan 212, penggiringan isu terkait bahaya perekonomian di kuasai oleh para pendatang etnis Cina juga bertebaran di media sosial dan di tengah masyarakat termasuk di kaitkan dengan Pilkada DKI. Pada poin ini isu kesenjangan muncul tidak terhindarkan. Secara ekonomi, etnis minoritas memegang porsi yang sangat signifikan dari jatah ekonomi nasional. Kampanye untuk memboikot produk-produk asing, serta gerakan membangun ekonomi mandiri pasca Gerakan 212 menunjukkan, bagaimana keresahan ini demikian kuat dirasakan oleh masyarakat.

Proses dominasi identitas keagamaan akan menjadi sebab lahirnya sendi politik Indonesia baru. Dimana Indonesia di kenal oleh kalangan Negara-negara dunia bahwa Indonesia adalah Negara berlandaskan Pancasila dan tentu kehidupannya makmur antar masyarakat maupun individu. Pluralisme, Nasionalisme dan Agamawan kini menjadi identitas yang mengembalikan marwah keindonesian pada kultur kepancasilaan dengan semboyan *bineka tunggal ika*.

Kemenangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno pada kontekstasi Pilkada DKI tahun 2017 membuat para elit politik lebih berhati-hati dalam kontekstasi Pemilu serentak 2019. Agama dan rasisme menjadi isu sentral dalam politik 2019. Terlepas dari dua isu tersebut, gerakan 212 telah memengaruhi sistem politik di Indonesia, dan bahkan penunjukkan Ma'ruf Amin oleh Joko Widodo sebagai calon Wakil Presiden dianggap untuk menjaga tingkat elektoralnya dikalangan umat Islam. Selain itu, Gerakan 212 juga telah memengaruhi pandangan politik masyarakat terkait latarbelakang agama seseorang untuk menduduki jabatan politik. Berdasarkan hasil survei (sebelum gerakan 212),¹⁶ terdapat 42 persen masyarakat (Islam) Indonesia yang berpandangan bahwa hanya orang Islam yang boleh menduduki jabatan politik, namun angkut tersebut mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 54 persen setelah massifnya gerakan 212.

Seperti aksi Reuni yang berlangsung tanggal 2 Desember 2018 berhasil mengulang aksi 2 tahun silam dengan di hadiri ratusan ribu massa. Perkiraan massa yang hadir lebih sedikit oleh beberapa pengamat ternyata meleset. Massa yang hadir tumpah ruwah di Monas dan

¹⁶ Fareed Zakaria, *Aksi Bela Islam dan Dampaknya Bagi Politik dan Keamanan Indonesia*, <https://www.matamatapolitik.com/opini-aksi-bela-islam-dan-dampaknya-bagi-politik-indonesia/>, diakses tanggal 23 Juni 2020.

sepanjang jalan Medan Merdeka Barat dan sekitar Patung Kuda. Bila menurut Tim Riset Tirto menggunakan teori Herbert Jacob di perkirakan jumlah peserta yang berkerumun di Reuni 212 di perkirakan sebanyak 429.431 orang dalam keadaan padat, dan 772.976 orang dalam kerumunan padat.

Hanya saja misi yang terlihat kali ini tidak lagi memenjarakan “penistaan agama”, tetapi untuk kepentingan yang masih abu-abu. Indikasinya terlihat banyaknya spekulasi muncul terhadap aksi ini, baik sebagai aksi politik yang terselubung dengan kemas agama, murni ajang silaturahmi antar umat Islam, atau acara dzikir kebangsaan.¹⁷ Memang terdapat banyak poin yang di garis bawahi dalam aksi tersebut seperti elit partai politik yang hadir mayoritas pendukung Prabowo-Sandi, membawa bendera bertulisan Tauhid, diawali rangkaian keagamaan, penyebutan kata “ganti presiden”, penggunaan kalimat-kalimat kritik terhadap rezim saat ini (kriminalisasi ulama, hanya membangun infrastruktur dan lain-lain), teriakan takbir, dan *counter statement* yang ditujukan kepada aksi ini (radikal, anti Kebinekaan dan anti Pancasila).

Gejala ini bisa jadi sindrom politik identitas yang kuat dari massa atas tidak terwakilnya aspirasi mereka. Meminjam bahasanya Nicola Colberan dari *Norwegian Centre For Human Rights*, di Indonesia agama punya multi identitas yang diwakilinya, mulai dari identitas personal, identitas etnis, identitas politik, dan identitas nasional. Artinya, masalah tentang agama cenderung punya pertalian dengan banyak hal dan membuatnya punya implikasi sosial-politik yang sangat besar. Dampaknya kemudian menjadi letupan-letupan yang kekuatannya berkali-kali lipat karena yang digunakan adalah identitas Islam yang menjadi agama dari 88 persen penduduk Indonesia.

Beberapa indikator yang ada memasukkan gerakan 212 sebagai politik identitas berbasis agama adalah pertama, adanya ikatan satu rasa satu sepenanggungan yang membentuk solidaritas gerakan atas nama bersama agama. Kedua gerakan yang dibangun atas nama ketidakadilan dan termarjinalkan secara sistem (*mustadfal'ufirt*) ketiga, gerakan 212 merambat pada sektor ekonomi seperti pendirian koperasi syariah dan 212 mart. Dari ketiga indikator tersebut pada dasarnya merupakan tanda akan adanya ketimpangan akses sumber daya yang memunculkan gerakan Islam populistik.

¹⁷ *Ibid.* Vanny Anggara.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat memberikan dua wajah baru dalam mengartikan gerakan 212. *Pertama*, gerakan 212 sebagai mekanisme untuk menggalang kekuatan melawan hegemoni politik atau dominasi kelas sosial. *Kedua*, gerakan 212 digunakan untuk mempertahankan kepentingan status quo dengan cara memanipulasi identitas politik untuk memperoleh dukungan serta legitimasi kekuasaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan terkait kebangkitan Islam pada sistem politik studi kasus dampak gerakan 212 tersebut, maka penulis menjabarkan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 1) Eksistensi Gerakan 212 adalah sebagai bentuk komunikasi politik dan upaya pemberhentian tindakan otoriterianisme di tubuh rezim. 2) Korelasi antara gerakan 212 dan kebangkitan Islam adalah suatu upaya kemajuan, kesetaraan dan perimbangan umat Islam terhadap dominasi paham sekularisasi di tubuh pemerintahan. 3) Terpilihnya Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan terpilihnya Ulama senior Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Joko Widodo adalah hasil proyeksi dari dampak gerakan 212 terhadap sistem politik di Indonesia. Agar penelitian dapat memberi nilai, maka penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya: 1) Agar pembahasan mengenai sistem politik di Indonesia harus di tinjau kembali berdasarkan standar demokrasi Pancasila. 2) Membangun kesadaran kolektif kepada masyarakat dan pemerintahan tentang demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, haruslah menjadi acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara untuk menjalankan arah dan laju sistem politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Winters, Jeffrey., *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1999).
Bakker, Anton dan Ahmad Chairis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jogjakarta: Kanisius, 1990).

Gafar, Afan, *Reformasi Politik: Menuju Kehidupan Politik Lebih Demokratis*, (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, 1998).

Robert W., Hafner, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001).

T. Hunter, Shireen, *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).

Jurnal

Abdullah, Assyari, Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Belah Islam 212: Antara Politik Identitas Atau Dan Ijtihad Politik Alternatif, *Jurnal An-nida*, Volume 41 Nomor 2, (2017).

Rahmawati, Anisa, *Aksi 212, Gerak Politik atau Moral*, (Makalah yang di ajukan pada Fermasi Reguler Sore di Universitas Katolik Widya Mandala Madium, (2020).

Larissa, Dea, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, (2019).

Sholikin, Ahmad, Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II, III, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 10 Nomor 1, (2018).

Website

Anggara, Vanny, *Aksi Bela Islam dan Rehuni 212 dalam Tinjauan Politik identitas*, <https://www.pojokwacana.com/aksi-bela-islam-dan-rehuni-212-dalam-tinjauan-politik-identitas/amp/>, diakses tanggal 21 Juni 2020.

Berita Terkini UMY, BHP UMY: Kebangkitan Dunia Islam Ditandai Dengan Bermunculnya Kembali Para Pengusaha Muslim, <https://www.umi.ac.id/kebangkitan-dunia-islam-ditandai-dengan-bermunculan-kembali-para-pengusaha-muslim.html>, diakses tanggal 23 Juni 2020.

Detiknews, ahok-divonis-2-tahun-penjara, <https://news.detik.com/berita/3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>, diakses tanggal 9 Mei 2017.

Mubarok, Machmud, *Sejarah 212*, <https://jabar.tribunnews.com/2016/12/03/sejarah-212>, diakses tanggal 19 Juni 2020.

akaria, Fareed., *Aksi Bela Islam dan Dampaknya Bagi Politik dan Keamanan Indonesia*, <https://www.matamatapolitik.com/opini-aksi-bela-islam-dan-dampaknya-bagi-politik-indonesia/>, diakses tanggal 23 Juni 2020.